

KEARIFAN DALAM BAHASA : SEBUAH TINJAUAN PRAGMATIS TERHADAP PROFIL KEBAHASAAN MEDIA MASSA PADA ERA KEBEBASAN PERS

Juniati Panjaitan

Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia

Info Artikel Abstrak

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2021

Disetujui

Pebruari 2021

Dipublikasi

Pebruari 2021

ABSTRAK

Dengan bergulirnya era kebebasan berbicara di Indonesia, bahasa sebagai instrumen komunikasi menjadi pilar penting dalam membangun etika berbicara. Pada era reformasi, memori yang lekat pada masyarakat adalah peristiwa-peristiwa yang hampir tidak terkendali. Memori itu kemudian direpresentasikan melalui bahasa dalam wacana yang berbunyi Reformasi yang kebablasan. Ketika berkomunikasi, seorang penutur harus memperhatikan prinsip kualitas. Artinya, jika seseorang menyampaikan informasi kepada orang lain, informasi yang disampaikan harus didukung dengan data. Prinsip kuantitas, artinya ketika berkomunikasi dengan orang lain, yang dikomunikasikan harus sesuai dengan yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Prinsip relevansi, artinya ketika berkomunikasi yang dibicarakan harus relevan atau berkaitan dengan yang sedang dibicarakan dengan mitra tutur. Dan, yang terakhir adalah prinsip cara, artinya ketika berkomunikasi dengan orang lain di samping harus ada masalah yang dibicarakan juga harus memperhatikan cara menyampaikan.

Kata Kunci: Inter-semiotik, *Reformasi*, *Kesantunan*, *Prinsip Kualitas*.

Abstract

With the rolling of the era of freedom of speech in Indonesia, language as an instrument of communication has become an important pillar in building speech ethics. In the reform era, memories that stick to society are events that are almost out of control. The memory is then represented through language in the discourse which reads excessive Reformation. When communicating, a speaker must pay attention to the quality principle. This means that if someone submits information to others, the information conveyed must be supported by data. The principle of quantity, meaning that when communicating with other people, must be communicated in accordance with what is needed, not more or less. The principle of relevance, meaning that when communicating, what is being discussed must be relevant or related to what is being discussed with the speech partner. And, the last is the principle of method, meaning that when communicating with other people, in addition there must be problems that are discussed must also pay attention to how to convey..

Keywords: Reform, Courtesy, Quality Principles.

©2021 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

✉ Alamat korespondensi:
Kampus UMSU Jalan Kapten Mughtar Basri No 3,
Medan-Sumatera Utara, 20238
e-mail: jurnalbahterasia@umsu.ac.id.

e-ISSN 2721-4338

I. PENDAHULUAN

Menyusul kelahiran post-modernisme dan post-strukturalisme dalam filsafat modern, tidak bisa dipungkiri bahwa perbincangan tentang bahasa, lebih-lebih pada satu dasawarsa terakhir, menarik minat banyak kalangan dari berbagai disiplin. Mereka juga mengaitkan bahasa dengan berbagai disiplin atau bidang lainnya, seperti politik, hukum, sosial, budaya, filsafat dan sebagainya. Begitu besar peran bahasa bagi kehidupan manusia, sampai-sampai Confucius pernah mendapatkan pertanyaan, apa yang akan dilakukan seandainya diberi kesempatan memimpin negara. “Membenahi bahasa”, demikian jawaban Confucius singkat. Bahasa menurut filsuf Timur ini bukan sekadar cermin keteraturan berpikir, tetapi bahkan akan menentukan keteraturan dan malah ketidak-teraturan sosial (Rahardjo, 2001: 5).

Seiring dengan itu, dengan bergulirnya era kebebasan berbicara di Indonesia, bahasa sebagai instrumen komunikasi menjadi pilar penting dalam membangun etika berbicara. “Reformasi total”, demikianlah wacana yang produktif diujarkan dan dipublikasikan pada awal masa reformasi atau kemarahan tumbuh subur melalui media dalam bentuk wacana-wacana yang represif. Perjalanan reformasi total yang hendak dilaksanakan secara demokratis rupanya mampu menekan slogan “*bebas bertanggung jawab*” menjadi “*kebebasan pers/berbicara*”. Slogan, yang merupakan produk era orde baru itu kini seakan-akan telah terhapus dari memori pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada era reformasi, memori yang lekat pada masyarakat adalah peristiwa-peristiwa yang hampir tidak terkendali. Memori itu kemudian direpresentasikan melalui bahasa dalam wacana yang berbunyi “*Reformasi yang kebablasan*”. Pertimbangan penggunaan kata-kata yang arif, kata sapaan penghormatan kepada para pejabat negara atau pun tokoh masyarakat mulai berkurang dalam wacana di media. Hipotesis yang dapat diajukan adalah: hilangnya memori kearifan atau sikap hormat kemungkinan besar mengakibatkan hilangnya kata-kata arif dan sapaan penghormatan dalam komunikasi publik.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Pemilihan data tertulis dilakukan berdasarkan topik berita yang secara aktual menjadi berita hangat dan yang mampu berpengaruh pada pergolakan situasi masyarakat. Parameter yang digunakan dalam tipe data aktual tersebut didasarkan atas keberlangsungan topik berita di berbagai media dan dalam rentang waktu yang signifikan.

Penjaringan data dilakukan dengan cara penyimakan. Korpus data wacana tulis dijaring dari satuan-satuan kalimat yang mengandung medan makna yang berkaitan dengan perilaku ketidakarifan. Korpus data wacana lisan dijaring dengan teknik rekam.

Pertimbangan teknis dan waktu, data wacana lisan ini hanya digunakan sebagai pendukung analisis data wacana tertulis. Wacana lisan yang digunakan sebagai data pendukung adalah rekaman dialog interaktif dari TV One dan Metro TV. Rentang waktu yang diambil sebagai data adalah rekaman siaran dari bulan April sampai Juni 2010. Pemilahan korpus data dirancang untuk dapat menjawab tiga butir masalah penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, korpus data wacana yang mengandung tuturan sasaran penelitian dipilah-pilah berdasarkan jenis makna dan daya ilokusi yang ditimbulkan oleh satuan-satuan bahasa yang membentuk tuturan sasaran.

Analisis korpus data dilakukan dengan menggunakan analisis makna referensial dan kontekstual serta analisis pragmatis yang berkenaan dengan daya ilokusi tuturan. Istilah yang digunakan untuk menyebut korpus data, yang merupakan potongan wacana, adalah *teks*. Istilah partisipan komunikasi yang akan digunakan dalam analisis adalah *penyapa* dan *pesapa*. Penyapa digunakan untuk menggantikan istilah pembicara, penulis, atau pengirim pesan (*sender*). Kata pesapa digunakan untuk menggantikan kata kawan bicara, pembaca, atau penerima pesan (*receiver*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya, Cruse (2000:331-333) menyatakan bahwa dalam komunikasi pembicara mengungkapkan suatu hal dengan daya ilokusi tertentu. Secara tegas Cruse menyatakan bahwa dalam komunikasi tidak ada wacana tanpa daya ilokusi. Konsekuensi logis pernyataan tersebut adalah bahwa sebuah wacana, yang dibentuk oleh konstituen-konstituen yang berupa kata, belum dapat digunakan sebagai instrumen komunikasi verbal jika tidak disertai dengan daya ilokusi. Dalam tindak komunikasi, sebuah wacana, yang hanya menampilkan makna lingual tanpa menampilkan ilokusi, tidak memuat pesan apa pun yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Sebagai akibatnya, perlokusi yang merupakan konsekuensi atau efek pada kawan bicara tidak terjadi. Austin (1962) mengelompokkan tindak tuturan ke dalam tiga tindakan, yakni *locutionary act*, *illocutionary act*, dan *perlocutionary act* (periksa Downes, 1988:307- 309). *Locutionary act* berkenaan dengan tindak mengujarkan tuturan. *Illocutionary act* berkenaan dengan maksud pembicara yang terealisasi melalui wacana. *Perlocutionary act* berkenaan dengan konsekuensi atau efek yang ada pada kawan bicara. Searle (1969) menyajikan klasifikasi tindak ilokusi menjadi lima, yakni *assertives*, *directives*, *commissives*, *expressives*, dan *declaratives* (Cruse, 2000:342).

Berdasarkan klasifikasi tindak tutur serta macammacam daya ilokusi yang menyertai tindak tutur tersebut, penelitian ini melihat daya ilokusi tersebut dari sisi negatif yang dihadirkan dalam wacana. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menemukan ketidakarifan dalam berbahasa, maka sisi negatif daya ilokusi mengarah pada realisasi

ketidakarifan dalam berbahasa. Daya ilokusi ini merupakan representasi pragmatis wacana.

Berkaitan dengan ilokusi kearifan, kesantunan dalam berbahasa merupakan salah satu wujud kearifan. Dalam membahas prinsip/maksim kesantunan, Leech (1988:131) menjelaskan bahwa kesantunan melibatkan dua pihak, yakni *self* dan *others*. *Self* dapat diartikan sebagai pihak penyapa dan *others* adalah pihak pesapa.

Pihak pesapa dapat dibedakan juga menjadi dua, yakni partisipan tindak komunikasi dan nonpartisipan atau pihak ketiga yang dibicarakan. Dengan demikian, kesantunan dalam berbahasa mencakup tiga peran, yakni penyapa, pesapa, dan orang yang dibicarakan.

Tabel 1 Klasifikasi Tindak Tutur dan Ilokusi Ketidakarifan

Tindak Tutur	Ilokusi Ketidakarifan
Asertif	Mengeluh/komplain
	Mendesak
	Menuntun
Direktif	Memerintah
	Memaksa
	Membujuk
	Menghasut
Komisif	Menyumpai
	Mengancam
Ekspresif	Kesal
	Marah
Deklarasi	Menghakimi
	Memberitahu (netral)
	Memperingatkan

Tabel 2. Prinsip Kesantunan dan Ilokusi Ketidakarifan

Prinsip Kesantunan	Klasifikasi Ilokusi Ketidakarifan
Kearifan	Merugikan
Kedermawanan	Menuduh
	Memfitnah
Pujian	Mengejek
	Mengancam
	Mengumpat
Kerendahan Hati	Merendahkan
	Melecehkan
Kesepakatan	Menentang/Kontra
Simpati	Antipati

Tabel 3. Prinsip Wacana dan Klasifikasi Semantis

Prinsip Wacana	Klasifikasi Semantis
<i>Quantity</i> 'kuantitas'	Berlebihan
<i>Quality</i> 'kualitas'	Hiperbol
	Lugas
	Kebohongan
	Tidak akurat
	Kasar
<i>Relation</i> 'hubungan'	Tidak relevan
<i>Manner</i> 'cara'	Interpretative
	Metaforis
	Eufimisme

Penelitian ini mengklasifikasikan ilokusi ketidakarifan yang menyangkut prinsip-prinsip kesantunan sebagaimana Tabel 2. Grice (1991:308-309) dalam pembahasan tentang *logic and conversation* menjelaskan empat prinsip kerja sama dalam tindak komunikasi. Jika ditempatkan dalam kerangka pikir yang mengoposisikan aspek semantic dan aspek pragmatis, pengelompokan empat prinsip kerja sama yang disajikan oleh Grice tersebut merupakan representasi semantis wacana. Tabel 3 di atas merupakan hasil klasifikasi semantic wacana yang ditemukan dalam penelitian ini dengan mengacu kepada prinsip kerja sama Grice. Hasil klasifikasi semantis yang tertera dalam Tabel 3 di atas merupakan bentuk ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja sama Grice tersebut.

Hadirnya *Medan Prujaji* telah disambut hangat oleh bangsa kita, terutama kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. Buktinya tidak lama kemudian Tjokroaminoto dari "Sarikat Islam" telah menerbitkan harian *Oetoesan Hindia*. Nama Samaun (golongan kiri) muncul dengan korannya yang namanya cukup revolusioner yakni *Api*, *Halilintar* dan *Nyala*. Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni *Guntur Bergerak* dan *Hindia Bergerak*. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian *Benih Merdeka* dan *Sinar Merdeka* pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian *Suara Rakyat Indonesia* dan *Sinar Merdeka* di tahun 1926. Tercatat pula nama harian *Sinar Hindia* yang kemudian diganti menjadi *Sinar Indonesia*.

Penerbitan media massa pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun ada juga yang mendapatkan izin dari pemerintahan Belanda. Dan ketika isi media acapkali

berseberangan dengan pola pikir pemerintah Belanda sesering itulah pers di breidel. Munculah kebijakan pembelengguan kebebasan menyuarakan pesan kebebasan negeri yang tertuang dalam undang-undang Drukpers reglement tahun 1856 tentang aturan sensor preventif. Pers ordonantie tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar.

Pada masa ini tokoh-tokoh pergerakan yang mengopinikan kemerdekaan lewat media massa seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul oleh dua penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star. De Jonge sendiri menamakan artikel-artikel tokoh pergerakan (memberi labelling) gezagsvijandige artikelen atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah.

Di masa pemerintahan Jepang kehidupan pers lebih dipersempit, selain UU Belanda UU No 16 yang pasal-pasalanya sangat menakutkan mengenai izin terbit, pembelengguan kebebasan pers dengan memasukan tokoh-tokoh pergerakan kedalam penjara, dan membreidel penerbitannya diberlakukan. Di setiap surat kabar ditempatkan Shidooin (penasihat) yang tidak jarang menulis artikel dengan mencatat nama anggota redaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Abrar, Ana Nadhya. 1997. *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aitchison, Jean. 1990. *Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon*. Cambridge: BasilBlackwell.

Barthes, Roland. 1967. *Elements of Semiology*. London: Jonathan Cape, Ltd.

Bertens, K. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. (rev. ed.). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

..... 2001. *Etika*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Brown, Gillian and George Yule. 1989. *Discourse Analysis*. Cambridge: Cambridge University Press.